



Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Yang Berada Di Kabupaten Tasikmalaya)

Sri Rahayu ¹⁾, Dewi Fatimah Kartawinagara ²⁾

^{1,2)} Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom

Email: ¹⁾ sriahayu@telkomuniversity.ac.id ; ²⁾ kartawinagaradewi@gmail.com

How to Cite :

Rahayu, S., Kartawinagara, D. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (2). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>

ARTICLE HISTORY

Received [26 April 2023]

Revised [26 juni 2023]

Accepted 22 Juli 2023]

KEYWORDS

Village Fund Management, Village Fund Management Officers Competence, Internal Control System, Information Technology.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Tasikmalaya mendapat apresiasi atas pengelolaan dana desanya yang baik. Namun, dalam kurun waktu lima tahun sejak 2016-2020, Kabupaten Tasikmalaya menjadi satu-satunya Kabupaten di Priangan Timur yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Tujuan studi ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal yang digunakan untuk mengelola sumber daya moneter di komunitas kecil, dan penggabungan TI berkontribusi untuk membuat administrasi keuangan desa yang akuntabel. Penelitian ini menggunakan strategi nonprobability sampling, yaitu pada seluruh aparatur desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sejumlah 351 desa. SPSS versi 25 digunakan untuk analisis statistik, yang terdiri dari regresi linier berganda. Analisis data penelitian ini mengungkapkan bahwa secara parsial dan simultan kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

Since 2015 until 2019, The Regency of Tasikmalaya was appreciated for its ability to manage and allocate the village fund. But, within five years since 2016 until 2020, The Regency of Tasikmalaya became the only regional in Priangan Timur that received a Fair with Exception (WDP) for its 2018 Regional Government Financial Report. The purpose of this analysis was to determine the influence of the competency of village fund management officers, internal control procedures were working to manage monetary resources in small communities, and the incorporation of IT contributes to making village financial administration accountable. This study used a non-probability sampling strategy, namely in all village apparatus in Tasikmalaya Regency, West Java, a total of 351 villages. Multiple linear regression was performed statistically using SPSS version 25. Discussion of these findings data reveals that the competency of village fund management officers, internal control system, and IT utilization influenced the accountability of village funds management.

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus memaksimalkan peranannya dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak berwenang atas pengelola keuangan daerah harus mampu menyusun dan menyajikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, memastikan informasi yang ada pada laporan keuangan diberikan secara transparan kepada masyarakat, serta melakukan pemeriksaan dalam proses penyusunan laporan pengelolaan keuangan demi dihasilkannya laporan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hardiningsih et al., 2019). Infrastruktur pengelolaan keuangan desa dinyatakan bertanggungjawab dan berhasil apabila laporan yang dihasilkan atas dana desa tersebut bersifat akuntabel (Pahlawan et al., 2020). Akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah menjadi nilai yang sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peranan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah (Widyatama et al., 2017).

Kabupaten Tasikmalaya telah mendapatkan apresiasi atas kemampuannya mengelola dan mengalokasikan dana desa yang diterimanya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Namun demikian, LKPD tahun 2018 mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Laporan korupsi dana hibah salah satu kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya yang diterima membuat Kabupaten Tasikmalaya tidak mampu memperdebatkan suatu posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dipertahankan secara beruntun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Penilaian WDP atas LKPD tersebut disebabkan oleh beberapa hal terkait penyajian atas laporan keuangan daerah yang harus dibenahi dan diperbaiki. Termasuk ke dalamnya adalah aset, kesesuaian sistem akuntansi pemerintah, serta kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkup Pemerintah Daerah. Hal yang masih harus diperbaiki dan dibenahi adalah sistem pengendalian internal, khususnya pada sistem pengendalian belanja hibah. Pendapat lain ditambahkan oleh Basuki Rahmat yang merupakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, opini WDP yang diperoleh juga disebabkan oleh penurunan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini juga menjadi alasan mengapa laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 yang harus ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya meskipun laporan keuangan tersebut penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dilakukannya penindaklanjutan adalah untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban penilaian tersebut. Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya menjadi satu-satunya kabupaten yang mendapat mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam kurun waktu lima tahun terakhir di wilayah Priangan Timur (AyoTasik.com).

Dua tujuan memandu penyelidikan ini, keduanya didasarkan pada kejadian yang baru saja disebutkan: (1) menilai seberapa baik perangkat pengelolaan dana desa saat ini berfungsi; (2) Pada tahun 2022, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya akan lebih memahami bagaimana faktor-faktor yang saling berhubungan antara aparat pengelola keuangan desa, pengendalian sistem internal, dan penggunaan TI mempengaruhi transparansi dan tanggung jawab sektor tersebut.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penganggaran dan anggaran daerah harus dicatat sesuai dengan undang-undang adalah yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban pengelolaan dana desa" yang diberlakukan mengenai administrasi anggaran desa (Supadmi & Suputra, 2018).

Setiap tahapan dari lima tahapan tanggung jawab anggaran di masyarakat pedesaan merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan dengan baik yang mencakup pembuatan rencana, pengaplikasian, kegiatan menata, pemberitahuan, dan pengambilan tanggung jawab yang efektif. Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan telah diberlakukan (Asmawati & Basuki, 2019).

Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa

Kompetensi didefinisikan perilaku serta kapasitas kerja yang meliputi aspek pengetahuan atau *knowledge*, keterampilan atau *skill*, dan sikap atau *attitude* sesuai tugas beserta fungsi yang melekat pada kedudukan sebuah profesi, definisi tersebut tercantum pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013. Kemampuan mesin, organisasi, atau sistem untuk mengelola sumber daya manusianya secara efektif yang disusun untuk mencapai sebuah tujuan dengan efisien dan efektif (Sugiarti & Yudianto, 2017). Agar kompetensi sebagai pengelola dana desa terpenuhi, maka aparatur harus mendapatkan pengetahuan untuk menyusun laporan keuangan melalui latar pendidikan yang sesuai seperti akuntansi, ikut aktif sebagai peserta pelatihan terkait pembuatan laporan keuangan, serta didapat dari pengalaman menjadi tenaga pekerja di bidang keuangan (Nurfauza & Rahayu, 2021). Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat didefinisikan "kompetensi aparatur pengelola dana desa" sebagai kombinasi dari ilmu, kesanggupan, dan sifat seseorang yang memungkinkan mereka untuk mengelola uang desa secara efektif. Kepala desa dan para pembantunya (sekretaris, kepala seksi, dan bendahara) yang membentuk pemerintahan desa, wajib mengetahui alur dari proses mengatur dana desa. Risiko atas keputusan yang diambil seringkali timbul karena rendahnya kapasitas kerja yang dimiliki pengelola dana desa (Indriasari et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur pengelola dana desa maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desanya, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh (Mada et al., 2017), (Atiningsih & Ningtyas, 2019), serta (Sugiarti & Yudianto, 2017).

H1: Kompetensi aparatur pengelola dana desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern memiliki pengertian sebagai alur atau skema yang menyeluruh pada keputusan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan audit dalam sebagai "kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan suatu instansi dan seluruh pegawainya dengan tujuan memberikan keyakinan terhadap tujuan organisasi". Kepatuhan terhadap peraturan ini mensyaratkan bahwa semua elemen dari sistem pengendalian internal suatu badan berada pada tempatnya dan beroperasi sebagaimana dimaksud.

Pilihan yang baik dapat diharapkan ketika sistem pengendalian internal diterapkan dengan benar. Karena inti dari sistem pengendalian internal adalah menimbang manfaat terhadap biaya dari setiap pilihan. Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 pasal 4 menuntut kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa untuk menciptakan dan merawat lingkungan pemerintah desa yaitu salah-satunya melalui kepemimpinan yang kondusif yang ditunjukkan dengan memperhatikan risiko yang timbul atas keputusan yang dibuat, memastikan aset dan informasi hanya diakses dan digunakan oleh pihak dan cara yang sah, dan menanggapi secara positif laporan yang diterima terkait dengan keuangan, anggaran, serta program dan kegiatan yang terlaksana dan akan dilaksanakan. Dana desa akan teralokasikan dengan baik, aset yang dimiliki desa akan terlindungi, dan terhindar dari kemungkinan kecurangan yang akan terjadi. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal memiliki peran untuk menjaga pengelolaan dana desa efisien, efektif, dan akuntabel pada pelaporannya (Amaliya & Maryono, 2022). Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh (Amaliya & Maryono, 2022), (Atiningsih & Ningtyas, 2019), (Suprihastini & Santoso, 2017), serta (Kewo, 2017).

H2: Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi memiliki definisi sebagai pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah alat, kegiatan mengolah, dan ekstraksi benda, serta dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan (Anshori, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik

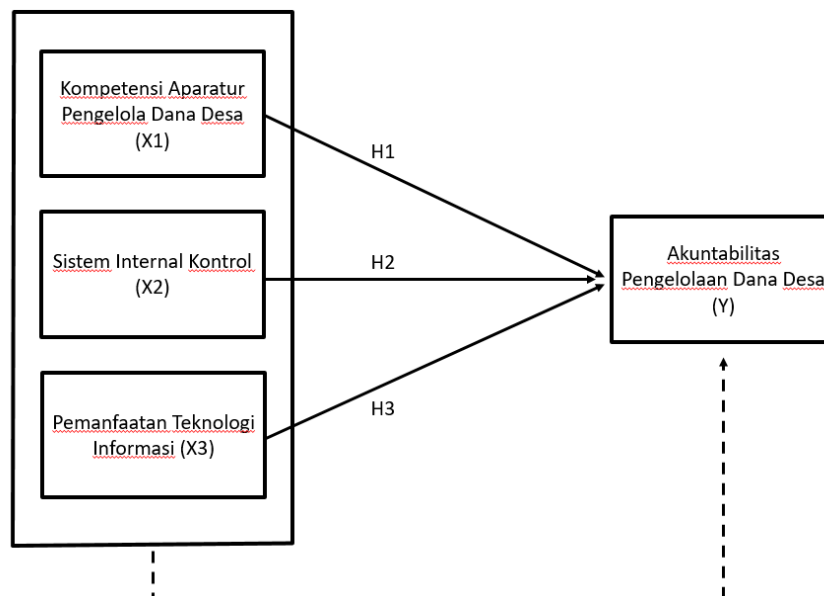
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, informasi memiliki definisi sebagai sebuah pengkajian, pernyataan, pandangan, dan suatu hal yang memiliki *value*, makna, serta pesan, baik dalam sebuah data ataupun fakta yang pemahamannya yang dapat sampai kepada penerimanya dengan dilihat, didengar, dan dibaca dalam bentuk yang disajikan pada media elektronik ataupun non-elektronik.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, teknologi informasi diartikan sebagai mekanisme untuk menghimpun, mempersiapkan, mencadangkan, menggarap, melaporkan, menguraikan, serta menyebar luaskan sebuah informasi.

Pemanfaatan atas teknologi informasi yang maksimal akan memenuhi tiga indikator penggunaan komputer dan internet, termasuk seberapa sering dan seberapa banyak perangkat lunak digunakan (Aulia, 2018). Kajian ini yang dilakukan secara maksimal dapat membantu aparatur pengelola dana desa sebagai dalam memenuhi tanggung jawabnya menangani anggaran desa. Hal ini juga dapat memberikan akibat yang positif pada laporan yang dihasilkan yakni dapat meminimalisir terjadinya salah saji pada laporan yang dibuat, karena teknologi informasi memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi (Sugiarti & Yudianto, 2017). Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh (Sugiarti & Yudianto, 2017).

H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Keterangan:

—————> Pengaruh secara parsial

- - - - -> Pengaruh secara simultan

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Studi ini mengandalkan pendekatan kuantitatif untuk pengumpulan data. Pengumpulan data primer merupakan hasil dari pemanfaatan instrument penelitian berupa kuesioner yang disebarkan melalui media cetak dan online (*google form*). Peserta meliputi kepala desa, sekretaris desa, petugas keuangan, dan lurah atau kepala desa dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya untuk tujuan penelitian ini. Kuesioner yang berhasil terkumpul dan dapat digunakan adalah sebanyak 603 data responden dengan komposisi sebanyak 142 responden atau sebesar 23,5% merupakan kepala desa, 171 responden atau sebesar 28,4% merupakan sekretaris desa, 150 responden atau sebesar

24,9% merupakan kaur keuangan, serta 140 responden atau sebesar 23,2% lainnya merupakan kaur/kasi.

Setelah mengumpulkan informasi dari responden, peneliti memeriksa keakuratan dan konsistensi data. Pengujian asumsi klasik, seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dilakukan setelah validitas dan kepercayaan data telah ditetapkan. Setelah data terkumpul, dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui temuan penelitian; pengujian ini terdiri dari (a) nilai R², (b) uji F, dan (c) uji t untuk subhimpunan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didefinisikan sebagai sebuah data yang dapat dimanfaatkan untuk menjabarkan karakteristik data tanpa adanya analisis dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021). Data akan dijabarkan menurut tampilan tabel kategori statistik deskriptif:

Tabel 1. Kategori Statistik Deskriptif

Presentase	Kategori
20% - 36%	Sangat Buruk
Lebih dari 36% - 52%	Buruk
Lebih dari 52% - 68%	Cukup
Lebih dari 68% - 84%	Baik
Lebih dari 84% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono, 2021

Adapun hasil statistik deskriptif atas 603 data responden akan ditampilkan pada tabel 2:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Skor Ideal	Total Skor	Persentase	Kategori
Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X1)	27.135	24.100	88,8%	Sangat Baik
Sistem Pengendalian Internal (X2)	39.195	34.068	87,0%	Sangat Baik
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	18.090	15.567	86,1%	Sangat Baik
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	60.300	53.598	89,0%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2022

Persentase rata-rata setiap variabel penelitian yang ditunjukkan dalam tabel 2 menunjukkan angka di atas 84%. Artinya, seluruh variabel yang diteliti berada dalam kategori sangat baik.

Analisi Regresi Berganda

Hasil pengujian regresi linear berganda melalui *software* SPSS versi 25 akan ditampilkan pada tabel 3:

Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	15,335	2,07	
	Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa	0,531	0,079	0,25
	Sistem Pengendalian Internal	0,449	0,055	0,317
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,044	0,106	0,346

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 3 menampilkan bukti dari berbagai analisis regresi, dari mana dapat disimpulkan persamaan berikut:

$$Y = 15,335 + 0,531X_1 + 0,449X_2 + 1,044X_3 + e$$

Berdasarkan model persamaan linear berganda tersebut dapat diambil kesimpulan:

- 1) Konstanta (α) sebesar 15,335 menunjukkan keadaan saat variabel dependen yaitu karena tidak ada pengaruh faktor independen sehubungan dengan determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), Y akan tetap tidak berubah;
- 2) Variabel independen pada penelitian ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,531 setiap adanya pertambahan satu satuan dari kompetensi aparatur pengelola dana desa (b_1);
- 3) Variabel independen pada penelitian ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,531 setiap adanya pertambahan satu satuan dari sistem pengendalian internal;
- 4) Variabel independen pada penelitian ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,531 setiap adanya pertambahan satu satuan dari pemanfaatan teknologi informasi (b_3).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kemampuan variabel independen dalam penelitian ini dapat diketahui melalui hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dengan hasil pengujian yang akan ditampilkan pada tabel 4:

Tabel 4. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,827 ^a	0,684	0,683	4,705

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 4 menunjukkan hasil tes, nilai yang dihitung 0,683 (68,3%) untuk kuadrat R, artinya ketiga variabel penelitian menjabarkan sebesar 68,3%. Dan, sisa 0,317 atau 31,7% tidak menjadi variabel dependen pada penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Temuan dari uji simultan (uji F) disajikan pada tabel 5 dan memberikan wawasan tentang pengaruh interaktif faktor independen terhadap variabel dependen dalam penyelidikan:

Tabel 5. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28772,815	3	9590,938	433,181	,000 ^b
	Residual	13262,289	599	22,141		
	Total	42035,104	602			

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 5 menunjukkan melalui analisis statistik bahwa dampak terukur dari seluruh faktor penelitian independen (transparansi administrasi anggaran desa) terhadap variabel dependen (0,000 atau lebih kecil dari 0,05).

Uji Parsial (Uji t)

Pada tabel 6, kita melihat hasil uji parsial (uji t), yang menjelaskan kepentingan relatif variabel independen dalam menentukan nilai variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	15,335	2,070		7,408	,000
	Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa	,531	,079	,250	6,700	,000
	Sistem Pengendalian Internal	,449	,055	,317	8,134	,000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,044	,106	,346	9,818	,000

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 6 memberikan bentuk nyata dari pengujian hipotesis yang menolak H₀ karena nilai signifikansi 0,000 untuk kompetensi aparatur pengelola desa sebagai variabel X₁. Hal ini menunjukkan efek positif yang kuat pada penelitian variabel independen oleh efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan masyarakat.

Tabel 6 juga menunjukkan, berdasarkan temuan pengujiannya yaitu sistem pengendalian internal (diwakili oleh variabel X₂) berbeda secara signifikan dari nol, sehingga hipotesis nol (H₀) ditolak. Artinya, sistem pengendalian intern memang memiliki efek menguntungkan yang patut diperhatikan terhadap variabel dependen.

Penggunaan TI sebagai variabel X₃ juga menunjukkan signifikansi statistik (p 0,0001) pada tabel 6, menunjukkan bahwa H₀ dapat ditolak. Berdasarkan temuan penelitian ini, maka variabel dependen mendapat manfaat besar dari penggabungan TI.

Pembahasan

Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa (X₁), Sistem pengendalian internal (X₂), Pemanfaatan teknologi Informasi (X₃) terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y)

Sesuai dengan hasil percobaan kali ini, untuk mencapai *management* finansial desa dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi, finansial desa harus diatur oleh lembaga yang berkemampuan. Aparatur pengelola dana desa yang kompeten adalah aparatur yang memiliki dan mendapatkan

pelatihan serta pengetahuan terkait pengelolaan dana desa, memiliki keahlian dalam mengoperasikan perangkat penunjang pekerjaan (komputer), serta bersikap baik dan bertanggungjawab atas tugas yang dimiliki. Kedua, untuk mencapai pengelolaan dana desa yang memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi adalah dengan menjaga penerapan sistem pengendalian internal dengan baik seperti pada penilaian risikonya, karena pada pengambilan keputusan dibutuhkan identifikasi dan analisis risiko untuk mencapai keputusan yang akan berdampak baik. Kemudian untuk mencapai pengelolaan dana desa yang memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi yang terakhir, pemerintah desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan sebagai alat penunjang dalam menyelesaikan pekerjaan serta dengan digunakannya secara rutin, akan meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikannya. Dengan penggunaan komputer dan bentuk teknologi informasi lainnya, mesin yang bertanggung jawab mengelola uang desa akan lebih mudah melacak dokumen yang berkaitan dengan dana tersebut dan menghasilkan laporan administrasi yang akurat (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa (X₁) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil ini memperlihatkan yaitu kemampuan Aparatur Pengelola Dana Desa secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan Pengelolaan Dana Desa ($p < 0,000$). Artinya, tanggung jawab pengelolaan dana desa meningkat sebanding dengan efisiensi aparat yang melakukannya. Statistik deskriptif berdasarkan tanggapan Tabel 2 menunjukkan data seberapa kompeten setiap warga desa dalam menggunakan Perangkat Pengelola Dana Desa menguatkan temuan tersebut, menempatkan rata-rata tanggapan pada kisaran sangat dapat diterima (88,8%). Hal ini menunjukkan betapa efektifnya sistem desa dalam mengelola dananya di Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki kompetensi yang sangat baik sebagai pengelola dana desa dilihat dari pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dimiliki oleh para pengelolanya. Bukti dari penelitian sebelumnya menguatkan temuan ini yakni oleh (Sugiarti & Yudianto (2017) dengan hasil penelitian yang sama.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X₂) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern yang menguntungkan dan signifikan secara statistik terhadap variabel independen ditemukan pada uji parsial. Artinya, dengan asumsi sistem pengendalian internal yang memuaskan telah ditetapkan, akan lebih banyak orang dalam masyarakat yang merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan keuangannya. Statistik deskriptif Tabel 2 tentang peringkat responden terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern mendukung temuan ini, menempatkannya dalam kisaran yang sangat baik (peringkat 87,0%). Temuan tersebut menegaskan bahwa mekanisme kontrol internal pemerintah desa kuat di seluruh wilayah yang diperiksa di Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan sepenuhnya. Studi sebelumnya menguatkan temuan kami, memberikan kredibilitas untuk studi ini yakni oleh Amaliya & Maryono (2022), Atiningsih & Ningtyas (2019), Widyatama et al. (2017), Suprihastini & Santoso (2017), dan Kewo (2017) yang hasil penelitiannya yang sama.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil dari uji parsial penelitian mengkonfirmasi kuatnya pengaruh variabel bebas penelitian dengan arah positif ketika TI digunakan. Dengan kata lain, jika alat yang digunakan untuk mengelola dana di masyarakat memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia dengan sebaik-baiknya, maka akuntabilitas di bidang ini akan meningkat. Tabel 2 menampilkan statistik deskriptif berdasarkan tanggapan terhadap variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang memberikan kepercayaan pada temuan penelitian ini dengan menunjukkan bahwa, rata-rata, responden menilai penggunaan

Tl organisasi mereka sebagai 86,1 persen "sangat baik" atau "luar biasa". Studi sebelumnya, seperti dilaksanakan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017), memberikan bukti yang mendukung temuan yang disajikan di sini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dapat ditarik dari tes dan pembahasan tes yang dilakukan studi ini menemukan: (1) Kondisi kemampuan perangkat Proporsi rata-rata keunggulan dalam mengelola keuangan desa dengan skor 88,8%; Ada juga sistem pengendalian internal di atas rata-rata dengan skor 87,0%; penggunaan teknologi informasi juga kualitas tinggi dan di atas rata-rata dengan skor 86,1%; dan akuntabilitas pengelolaan dana desa juga luar biasa, mencapai tanda persentase median 89,0%; (2) Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 dipengaruhi oleh variabel bebas yang terdiri dari (a) keterampilan pengelola dana desa sebagai X1, (b) adanya sistem internal kontrol, dan (c) penggunaan sarana interaksi elektronik dan penyebaran informasi.

Saran

Penulis menawarkan usulan agar studi tambahan dilakukan dengan memasukkan variabel bebas. Karena faktor yang tidak termasuk dalam analisis ini masih menyumbang 31,7% dari total variasi. Adapun variabel yang dapat ditambahkan seperti partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan kejelasan sasaran anggaran. Hal lain secara teknis dalam melakukan pengumpulan kuesioner agar melakukan wawancara langsung ke kantor desa yang menjadi sampel penelitian dengan tujuan semua pernyataan yang terdapat pada kuesioner dapat tersampaikan lebih jelas dan akan mendapatkan lebih banyak responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, R., & Maryono. (2022). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13 (1), 122–133.
- Anshori, S. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 2(1), 88–100.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JOM FEB Riau University*, 1 (1), 1–15.
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21–42. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963>
- Indriasari, D., Sari, K. R., Arifin, K. Z., & Choiruddin. (2019). Determinants of Village Financial Management Accountability. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 431, 182–188.
- Kewo, C. L. (2017). The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance On Financial Accountability Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial*, 7 (1), 293–297.

- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Nurfauza, A., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020). *Universitas Telkom*.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang*, 580–590.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedu). ALFABETA.
- Supadmi, & Suputra, D. . D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145. <http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>
- Suprihastini, E., & Santoso, B. (2017). Effect of Regional Financial Accounting System, Internal Control Systems and Regional Financial Audit on Financial Accountability of Local. *International Conference and Call for Papers*, 830–852.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>